

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan faktor penting dalam tata Kelola pemerintahan yang baik. Terutama dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah, sebagai pengelola keuangan negara, dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal.

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menegaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** juga mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus berorientasi pada hasil (*performance-based budgeting*).

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran negara. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di dalam praktiknya sering kali ditemukan adanya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inefisiensi ini dapat berupa alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, pemborosan dalam pengadaan barang dan jasa, serta duplikasi program yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi *spending review* menjadi semakin relevan untuk diterapkan di berbagai sektor pemerintahan, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara memiliki peran strategis dalam memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Salah satu bentuk reformasi kebijakan yang dilakukan adalah dengan menerapkan *Spending review* dalam pengelolaan anggaran. Pelaksanaan *Spending Review* diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 107/PB/2018 tentang Pelaksanaan *Spending Review* Kanwil DJPb Jawa Tengah, menjadi salah satu

instansi yang telah mengadopsi kebijakan ini guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di wilayahnya. Studi kasus ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana *spending review* telah diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah.

*Spending review* merupakan suatu proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari program-program yang didanai oleh anggaran negara. Mekanisme pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian Lembaga diatur dalam PMK No.195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Melalui metode ini, pemerintah dapat mengidentifikasi program yang kurang efektif, mengalokasikan kembali dana ke sektor yang lebih prioritas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

*Spending review* adalah proses evaluasi sistematis terhadap belanja pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil optimal dan selaras dengan prioritas pembangunan (Parhusip, 2016). Pendekatan ini telah banyak diterapkan di berbagai negara maju, seperti Inggris, Belanda, dan Australia, yang berhasil mengoptimalkan belanja negara dengan mengeliminasi pengeluaran yang tidak produktif dan mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih strategis (OECD, 2018).

Implementasi *spending review* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya data yang transparan, resistensi dari berbagai pihak, serta keterbatasan kapasitas institusional. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang matang untuk mengintegrasikan metode ini dalam siklus penganggaran yang lebih luas. Dengan adanya sistem evaluasi yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, *spending review* juga dapat berperan dalam meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata publik dan investor. Dengan adanya evaluasi yang ketat terhadap efektivitas pengeluaran, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik serta memastikan bahwa kebijakan fiskal yang

diambil berorientasi pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Ini menjadi penting dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Penelitian *spending review* mayoritas tentang faktor pendukung dan penghambat *spending review* dalam pengambilan keputusan anggaran, kemudian terkait alokasi anggaran namun ada satu penelitian yang membedakan yaitu pada objek penelitian terkait implementasi *spending review* pada penelitian terdahulu objek penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I.Yogyakarta dan pada penelitian saat ini di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah.

Salah satu contoh nyata adalah hasil **Reviu Efektivitas Belanja di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022**, yang mencatat bahwa dari **total pagu anggaran sebesar Rp38,9 triliun**, terdapat **blokir pagu pada tiga Kementerian/Lembaga sebesar Rp0,22 triliun atau 0,06% dari total anggaran**. Hal ini menunjukkan adanya potensi inefisiensi yang perlu dievaluasi lebih lanjut. (djpb.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan informasi yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *spending review* dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah sejauh mana *spending review* telah diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, maka peneliti memilih judul penelitian “Analisis Implementasi *Spending Review* pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah Tahun 2024”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang disusun pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hasil *Spending Review* tahun 2024 ?
2. Apa dampak penerapan *Spending Review* pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan hasil *Spending Review* pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan dampak penerapan *Spending Review* di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai konsep *spending review* serta implementasinya dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

2. Manfaat Bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan pertimbangan bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan literatur tambahan dalam penyusunan judul penelitian yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini.

